



**KABUPATEN
JOMBANG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**BADAN
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK**



[bakesbangpol_jombang](#)



[Bakesbangpol Jombang](#)



[bakesbangpol.jbg](#)



[bakesbangpoljombang](#)



jombangkab.go.id/opd/kesbangpol



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

LKjIP Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2025 Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan masukan yang sangat kami harapkan.



Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan guna mewujudkan Kabupaten Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis.

Jombang, Januari 2026

KEPALA BAKESBANGPOL



BUDI WINARNO, ST.M.Si
NIP. 19741001999011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3 Mandat dan peran strategis Perangkat Daerah	14
1.4 Isu Strategis.....	16
2.Masih Rendahnya Partisipasi Politik.....	16
1.4.1 Ringkasan Laporan Hasil evaluasi.....	17
A. Indeks Harmoni Indonesia (IHI).....	17
B. Indeks Kewaspadaan Daerah	18
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik dan Indeks Kinerja Ormas.....	19
D. Indeks Kinerja Ormas	19
E. Nilai Sosial dan Budaya	19
F. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB).....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Perencanaan Strategis	21
2.1.1 Perencanaan Strategis	21
2.1.2 Perencanaan Kerja Tahun 2025.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun.....	29
3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	40
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir	46
3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	48
3.1.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	51
3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
3.2 Realisasi anggaran.....	70



BAB IV	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Upaya Perbaikan.....	90
a. Sasaran 1: Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis.....	90
b. Sasaran 2: Meningkatkan harmoni sosial dan budaya.....	90
c. Sasaran 3: Meningkatkan partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Ormas.....	90
d. Sasaran 4: Meningkatnya kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud.....	90
e. Sasaran 5: Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.....	91
4.3 Inovasi dan Penghargaan	91
4.4 Upaya Perbaikan.....	94
a. Sasaran 1: Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis.....	94
b. Sasaran 2: Meningkatkan harmoni sosial dan budaya.....	94
c. Sasaran 3: Meningkatkan partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Ormas.....	94
e. Sasaran 5: Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.....	95



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang (Bakesbangpol) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bakesbangpol berperan penting dalam menjaga stabilitas daerah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud) sebagai prasyarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dinamika lingkungan strategis yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya arus globalisasi, serta keberagaman sosial budaya masyarakat memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas Bakesbangpol. Berbagai permasalahan seperti menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, rendahnya partisipasi politik masyarakat, maraknya penyebaran informasi hoaks, serta potensi konflik sosial yang dapat muncul di tengah masyarakat menuntut pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Jombang melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan pendidikan politik dan demokrasi, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP disusun sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui LKjIP, Bakesbangpol menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan target yang direncanakan. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai tingkat pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Jombang, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mewujudkan Kabupaten Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik Secara kelembagaan Lembaga Teknis Daerah ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Sedangkan


dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang. Lembaga Teknis Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, fungsi dan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok

“ Membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan Bangsa dan Politik”.

Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sertapelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

- 
- pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Jombang

Dukungan aparatur adalah salah satu dari aspek manajemen yang penting dalam organisasi, dalam kaitan dengan fungsi manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring. Setiap fungsi akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang handal. Agar pengelolaan potensi sumberdaya aparatur bisa optimal dan seimbang maka perlu dibentuk struktur organisasi yang akan membagi potensi sumberdaya aparatur sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jombang.



Adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang terdiri dari:

- 1 Kepala Badan.
- 2 Sekretariat, berkoordinasi dengan:
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial. Budaya, Agama berkoodinasi dengan
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berkoordinasi dengan
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, berkoordinasi dengan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 94 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

▪ **Kepala Badan**

Badan Kesatuan bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.


▪ **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- h. serta pelayanan publik;
- i. Pengelolaan aset;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Melaksanakan koordinasipengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator

- 
- Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkup Badan;
- n. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - o. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
 - p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**
- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai
 - c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
 - d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan
 - f. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
 - h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;

- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

▪ **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi

- kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta

pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi


- kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud), Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi:

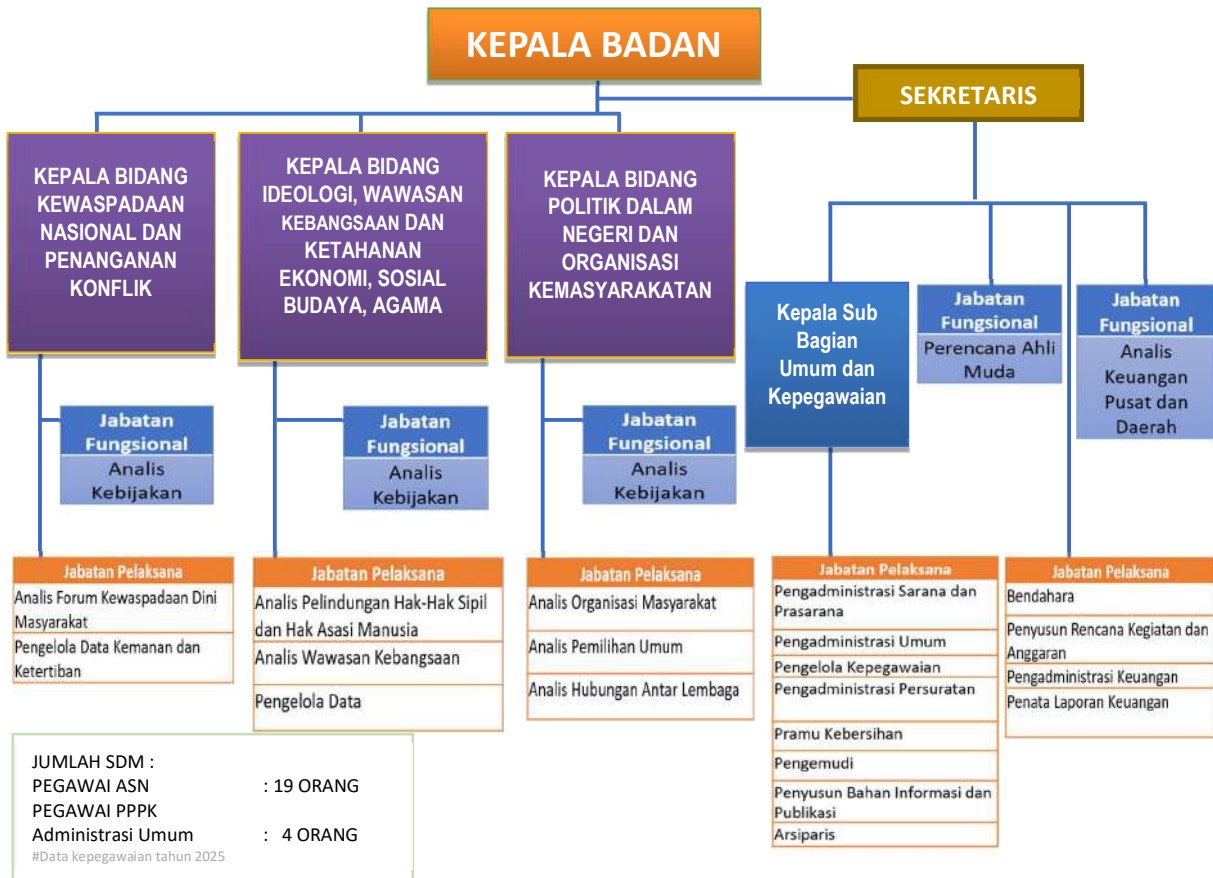
- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,

- 
- fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidangnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jombang



- Sumber daya Manusia yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sejumlah 23 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK).

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	11	6	17
	2. PPPK	-	2	2
	3. PPPK Paruh Waktu	4	-	4
	Jumlah	15	10	25

Sumber : SIAP ASN Tahun 2025

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS			
	Golongan IV	4	-	4
	Golongan III	6	5	11
	Golongan II	1	1	2
2.	PPPK			
	Golongan IX	-	1	1
	Golongan V	-	1	1
3.	PPPK Paruh Waktu	4	-	4
	Jumlah	15	8	

Sumber : SIAP ASN Tahun 2025

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 3			
2.	Strata 2	5		5
3.	Strata 1	7	5	12
4.	Diploma 3		1	1
5.	Diploma 1			
6.	Sekolah Menengah Atas/Sedejat	4	1	5
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat			
	Jumlah	16	7	

Sumber : SIAP ASN Tahun 2025

1.3 Mandat dan peran strategis Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah yang memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas daerah terutama di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan kehidupan berbangsa secara umum. Mandat ini dilaksanakan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, demokratis, dan kondusif sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol berlandaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan



nasional yang berlaku setelah tahun 2013. Dasar hukum utama antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tata kelola, pembinaan, dan pengawasan ormas di Indonesia.

Pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang memberikan pedoman bagaimana pemerintah daerah melakukan pendeteksian dini, pencegahan dini, dan penanganan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas.

Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas yang didirikan oleh warga negara serta hubungan koordinatif antara Kemendagri dan pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan aturan turunan lainnya.

Berdasarkan amanat peraturan nasional tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang menjalankan peran strategis sebagai berikut :

1. Memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
2. Memfasilitasi pendidikan politik dan demokrasi yang sehat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik masyarakat;
3. Menjadi penghubung dan koordinator antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi sosial;



4. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial sesuai pedoman nasional kewaspadaan di daerah;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan partai politik agar berperan aktif, tertib, serta sesuai aturan perundang-undangan; dan
6. Mendukung terwujudnya situasi daerah yang aman, kondusif, dan demokratis, yang menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi serta perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang menghadapi beberapa isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Isu-isu ini antara lain:

1. Perubahan nilai sosial dan budaya

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif berpotensi memicu konflik sosial dan menurunkan kualitas harmoni sosial. Kondisi ini menuntut peningkatan program pembinaan wawasan kebangsaan, toleransi, dan penguatan nilai-nilai kebhinekaan.

2. Masih Rendahnya Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam kegiatan pendidikan politik dan pemahaman etika demokrasi, masih perlu ditingkatkan.

3. Rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan

Masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, yang kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara konsisten.

4. Sistem deteksi dini konflik yang belum optimal

Koordinasi dan integrasi sistem kewaspadaan dini dan pencegahan konflik sosial di daerah belum berjalan secara maksimal, sehingga potensi konflik sulit diantisipasi lebih awal.

5. Penyebaran hoaks, intoleransi, dan radikalisme

Informasi yang tidak benar, sikap intoleran, serta pengaruh paham radikalisme masih menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

6. Belum Optimalnya Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Strategis

Peran organisasi kemasyarakatan serta forum-forum strategis (FKUB, FKDM, dan FPK) belum sepenuhnya optimal dalam mendukung stabilitas sosial dan politik daerah (Koordinasi belum konsisten dan belum maksimal)

1.4.1 Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Ringkasan laporan hasil evaluasi adalah ringkasan capaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang tahun 2025. Bakesbangpol Kabupaten Jombang memiliki 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan hasil tindak lanjut dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah Kabupaten Jombang. Sasaran strategis tersebut mengarah pada upaya peningkatan harmoni sosial dan budaya, partisipasi politik dan kinerja ormas, kewaspadaan daerah terhadap potensi konflik Ipoleksosbud, serta penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

A. Indeks Harmoni Indonesia (IHI)

Indeks Harmoni Indonesia merupakan indikator utama untuk mengukur tingkat kerukunan dan keharmonisan masyarakat dalam kehidupan sosial budaya. Indeks ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga toleransi, menghormati keberagaman, serta mencegah potensi konflik sosial dan budaya. Indeks Harmoni Indonesia sebagai indikator sasaran strategis Bakesbangpol

merupakan tindak lanjut dari visi Kabupaten Jombang “Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis” dengan fokus pada peningkatan harmoni sosial dan budaya. Berdasarkan data capaian tahun 2025, nilai Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Jombang mencapai 6,83, meningkat dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 6,50, yang menunjukkan adanya peningkatan keharmonisan sosial dan kualitas interaksi antar kelompok masyarakat. Peningkatan ini didukung oleh koordinasi intensif dengan OPD terkait serta pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan, dialog antar agama, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya yang berkelanjutan. Meski demikian, peningkatan indeks ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan media sosial, sehingga perlu upaya berkelanjutan dalam memperkuat literasi sosial budaya dan moderasi beragama.

B. Indeks Kewaspadaan Daerah

Indeks Kewaspadaan Daerah merupakan indikator yang mengukur tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi konflik Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya). IKD menggambarkan kemampuan daerah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator ini menjadi bagian dari sasaran strategis Bakesbangpol terkait peningkatan kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud. Berdasarkan data tahun 2025, nilai Indeks Kewaspadaan Daerah Kabupaten Jombang mencapai 75,26, melebihi target sebesar 74, yang menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam mendeteksi dan merespons potensi konflik. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi lintas sektor melalui forum kewaspadaan nasional dan perangkat terkait.



C. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik dan Indeks Kinerja Ormas

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik merupakan indikator penting dalam meningkatkan literasi politik, etika demokrasi, dan peran aktif masyarakat dalam proses politik serta pemilihan umum. Indikator ini sejalan dengan sasaran strategis Bakesbangpol untuk meningkatkan partisipasi politik dan kinerja organisasi kemasyarakatan. Pada tahun 2025, partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik mencapai 62%, melebihi target sebesar 60%, yang menunjukkan meningkatnya minat dan keterlibatan masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam pendidikan politik. Peningkatan ini didukung oleh penyelenggaraan pendidikan politik, sosialisasi, dan pembinaan etika politik yang dilakukan melalui kerja sama dengan partai politik, lembaga pendidikan, dan stakeholder terkait.

D. Indeks Kinerja Ormas

Indeks Kinerja Ormas juga menunjukkan peningkatan dengan capaian 66,29 dari target 66, menunjukkan bahwa kinerja organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jombang cenderung meningkat. Namun, capaian ini perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan yang lebih intensif agar peran Ormas/LSM semakin terarah dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Upaya pembinaan, pendataan, dan penguatan kapasitas Ormas serta pengawasan terhadap kegiatan organisasi menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja Ormas ke depan.

E. Nilai Sosial dan Budaya

Nilai sosial dan budaya merupakan indikator yang mengukur kondisi nilai-nilai sosial budaya masyarakat, termasuk toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap norma, dan keberlanjutan nilai-nilai lokal. Indikator ini juga berkaitan dengan upaya menjaga

harmoni sosial dan budaya serta mengurangi pergeseran nilai akibat pengaruh budaya digital. Pada tahun 2025, nilai sosial dan budaya Kabupaten Jombang mencapai 6,83, lebih tinggi dari target 6,48, yang menunjukkan adanya penguatan nilai sosial budaya melalui berbagai kegiatan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Keberhasilan ini didukung oleh kolaborasi dengan komunitas, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kearifan lokal.

F. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menjadi indikator sasaran strategis Bakesbangpol untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, nilai indeks yang dicapai oleh Bakesbangpol adalah 78,10, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 79,14. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan kualitas pelayanan, penyempurnaan sistem manajemen kinerja, serta pemenuhan indikator penunjang yang belum optimal. Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh perubahan sistem penilaian dan formulasi indikator, serta beberapa data indikator penunjang yang belum terverifikasi secara penuh oleh instansi penilai. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai indeks pada tahun berikutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penguatan kesatuan bangsa, ketahanan sosial budaya, serta kewaspadaan dini dalam menghadapi dinamika Ipoleksosbud merupakan bagian penting dari pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Perkembangan kondisi sosial politik dan dinamika kehidupan masyarakat yang bergerak cepat menuntut percepatan dan peningkatan kualitas program dalam bidang ketahanan ideologi, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan konflik sosial. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program tersebut, perencanaan Bakesbangpol harus disusun secara konsisten dan berkelanjutan melalui rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja tahunan (Renja). Dengan demikian, akuntabilitas dan kinerja Bakesbangpol akan lebih terukur dan berorientasi pada pencapaian hasil nyata dalam mewujudkan Jombang yang aman, kondusif, harmonis, dan demokratis.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Perencanaan Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mengalami perubahan, selama periode triwulan I sampai III, pelaksanaan kegiatan dan target kinerja masih mengikuti dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang merupakan kelanjutan dari program dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, mulai triwulan IV, pelaksanaan disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan tersebut memuat tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab bersama antara kepala daerah dengan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dalam rangka mewujudkan target kinerja pembangunan daerah.

Dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, tujuan Bakesbangpol mengalami penyesuaian untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang baru. Tujuan Bakesbangpol yang sebelumnya difokuskan pada peningkatan ketahanan sosial dan budaya,

kini lebih diformulasikan menjadi “Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis” Penyesuaian ini sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal, serta mendukung visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Sasaran Bakesbangpol tetap terdiri dari beberapa sasaran strategis, namun terdapat penyesuaian pada indikator dan rumusan sasaran agar lebih relevan dengan dinamika sosial politik daerah serta standar pengukuran yang lebih komprehensif. Sasaran pertama tetap berorientasi pada harmoni sosial dan budaya, namun indikatornya disesuaikan menjadi Nilai Sosial dan Budaya. Sasaran kedua terkait partisipasi politik dan kinerja Ormas, dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan Indeks Kinerja Ormas. Sasaran ketiga adalah peningkatan kewaspadaan daerah terhadap kejadian Ipoleksosbud, dengan indikator Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud. Selain itu, terdapat sasaran baru yang menegaskan komitmen birokrasi yang bersih dan efektif, yaitu Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol melaksanakan program-program utama yang selaras dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan pembangunan daerah, antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

3. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi
Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
dan Budaya, Program Peningkatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas serta
fasilitasi penanganan konflik sosial, serta
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

2.1.2 Perencanaan Kerja Tahun 2025

Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jombang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang
operasional dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 serta
Renstra Bakesbangpol 2025–2029, dengan fokus utama mewujudkan
Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis. Renja ini merupakan
penjabaran program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian

sasaran harmoni sosial dan budaya, peningkatan partisipasi politik dan kinerja organisasi kemasyarakatan, peningkatan kewaspadaan daerah terhadap potensi konflik Ipoleksosbud, serta penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang memuat komitmen bersama antara pimpinan dan unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara terukur. Dokumen ini menjadi instrumen pengendalian dan akuntabilitas kinerja, karena menegaskan kesepakatan tentang tugas, tanggung jawab, dan capaian yang harus diwujudkan oleh organisasi dalam satu periode anggaran. Dalam Perjanjian Kinerja, target kinerja dirumuskan dalam bentuk angka kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi saat evaluasi akhir tahun. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pernyataan tekad dan janji untuk mewujudkan kinerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini juga disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, sebagai wujud komitmen Bakesbangpol dalam meningkatkan ketahanan ideologi, memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan partisipasi politik, serta menjaga stabilitas sosial budaya dan keamanan daerah.



Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini, Politik dan Kemasyarakatan dan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Jumlah Konflik Ideologi	1 kasus
		Jumlah Konflik Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	3 kasus
		Jumlah Konflik Ekonomi dan Sosial Budaya	11 kasus
		Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	15 rekomendasi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,60 % (A)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, etnis/suku di Kabupaten Jombang	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	859,807,700,-
			Persentase kaderisasi	100%	

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
			calon pemimpin bangsa yang berkarakter kebangsaan		
2.	Meningkatkan kaderisasi partai politik di Kabupaten Jombang	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase partai politik yang melakukan kaderisasi	100%	5,893,356,500,-
3.	Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	39%	5.533.015.200,-
4.	Meningkatkan Pembinaan kerukunan beragama di Kabupaten Jombang	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama	100%	140,998,200,-
5.	Tersusunnya laporan deteksi dini dan cegah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini	3 laporan	606,054,200,-

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
	dini terhadap konflik sosial	dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	terhadap konflik sosila		
6.	Meningkatkan prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	100%	4,475,372,282,-
JUMLAH					17,508,604,082,-

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	6.48
2.	Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pendidiakn poltik (Persen)	60
		Nilai Kinerja Ormas (nilai)	65
3	Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dalam menghadapi kejadian Ipleksosbud	Prosentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud (Persen)	0.15
4.	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	79.14

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 863,950,700,-	PAPBD
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,222,688,900,-	PAPBD
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 7.007.887,500,-	PAPBD
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 124,669,600,-	PAPBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 574,977,400,-	PAPBD
6.	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,420,801,659,-	PAPBD

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian dan keberhasilan kinerja kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Perjanjian Kinerja 2025 terdiri dari PK awal (APBD 2025) dan PK perubahan (P-APBD 2025). Realisasi PK awal diukur hingga triwulan III, sedangkan PK perubahan hingga triwulan IV. Tabel berikut menunjukkan target dan capaian kedua dokumen tersebut.

Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
PK Awal Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI SD TRIBULAN III	CAPAIAN (%)
Sasaran 1				
Peningkatan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini, Politik Kemasyarakatan dan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Jumlah Konflik Ideologi	1	0	0
	Jumlah Konflik Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	3	0	0
	Jumlah Konflik Ekonomi dan Sosial Budaya	11	10	90,91
	Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	15	12	80,00

SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI SD TRIBULAN III	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, entis/suku di Kabupaten Jombang	Persentase entis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	100,00
	Persentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter kebangsaan	100	100	100,00
Meningkatkan kaderisasi partai politik di Kabupaten Jombang	Persentase partai politik yang melakukan kaderisasi	100	100	100,00
Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	39	23,08	59,18
Meningkatkan Pembinaan kerukunan beragama di Kabupaten Jombang	Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama	100	100	100
Tersusunnya laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	3	3	100
sasaran II				
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,60	75,05	91,97
Meningkatkan prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	100	84,6	84,6
Rata Rata Capaian				51,33



Sasaran Strategis 1

Capaian sasaran strategis Peningkatan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini, Politik Kemasyarakatan, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi hingga triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang relatif baik. Pengendalian konflik ideologi serta konflik politik dan organisasi kemasyarakatan dapat dijaga dengan baik, yang ditunjukkan oleh tidak ditemukannya konflik pada kedua indikator tersebut. Pada konflik ekonomi dan sosial budaya, realisasi mencapai 10 kasus dari target 11 kasus, atau sebesar 90,91%, yang mengindikasikan kondisi sosial masyarakat masih relatif kondusif. Selain itu, penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah terkait Analisis Terpadu Harkamtibmas (ATHG) telah terealisasi sebanyak 12 rekomendasi dari target 15 rekomendasi, dengan capaian 80,00%.

Pada aspek penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, capaian kinerja telah memenuhi target. Seluruh entis/suku di Kabupaten Jombang telah mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, demikian pula kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter kebangsaan dan kaderisasi partai politik yang mencapai 100 persen. Pembinaan kerukunan umat beragama serta penyusunan laporan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial juga telah terealisasi sesuai target. Namun demikian, indikator peningkatan peran aktif Ormas/LSM masih menunjukkan capaian sebesar 59,18%, yang perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan pada periode berikutnya melalui penguatan pembinaan dan pendampingan organisasi kemasyarakatan.

Sasaran strategis 2

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 75,05 dari target 81,60, dengan tingkat capaian sebesar 91,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Bakesbangpol telah berjalan, meskipun masih terdapat

beberapa aspek yang perlu disempurnakan, khususnya dalam penyalarsan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Sementara itu, persentase rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 84,6 persen dari target 100 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah serta konsistensi pelaporan kinerja individu dan unit kerja. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Bakesbangpol Kabupaten Jombang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat budaya kinerja, dan mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang lebih optimal pada akhir tahun anggaran.

Perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 memuat 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Format ini berbeda dengan perjanjian kinerja awal. Bahasa program hanya memuat nama program yang didukung dengan jumlah anggaran per masing-masing program. Target, realisasi, dan capaian tujuan dan sasaran pada perjanjian kinerja perubahan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis PK Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6,5	6,83	105
		Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	74	75,26	102

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Nilai sosial dan budaya (nilai)	6,48	6,83	105
		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	60	62	103,33
		Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	66	66,29	100,44
	Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud (Persen)	0,15	0,15	100,00
	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	79,14	78,10	98,69
Total Capaian PK					102,09

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan total capaian Perjanjian Kinerja sebesar 102,09 persen. Sasaran Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis berhasil melampaui target pada hampir seluruh indikator, antara lain Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kewaspadaan Daerah, nilai sosial dan budaya, partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, serta Indeks

Kinerja Ormas, yang seluruhnya mencapai lebih dari 100 persen. Selain itu, sasaran Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud tercapai sesuai target dengan persentase penurunan kejadian sebesar 100 persen. Sementara itu, sasaran Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan capaian sebesar 98,69 persen, yang meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tetap mencerminkan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel secara keseluruhan.

Tujuan :

Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis

1. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan indikator kinerja komposit yang dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan nasional di bidang politik dalam negeri. Pemerintah daerah tidak melakukan penghitungan secara mandiri terhadap nilai indeks ini, melainkan menggunakan hasil resmi pengukuran yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sumber data yang sah dan terverifikasi.

Pengukuran IHaI dilaksanakan menggunakan metode e-Survey Riset Publik yang diselenggarakan secara daring (online) oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. E-Survey ini dilaksanakan secara serentak pada 353 kabupaten/kota di 24 provinsi, dengan periode pelaksanaan pada 3 Maret sampai dengan 24 Maret 2025. Instrumen survei disusun secara terstandar dan mencakup 4 (empat) dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan religius/keberagamaan, yang dijabarkan ke dalam 8 variabel dan 40 indikator.

Formulasi penghitungan Indeks Harmoni Indonesia menggunakan pembobotan dimensi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu dimensi ekonomi (30%), dimensi sosial (23%), dimensi budaya (22%), dan dimensi religius/keberagamaan (25%). Nilai indeks

merupakan hasil agregasi dari seluruh indikator dan variabel pada keempat dimensi tersebut, yang selanjutnya dinyatakan dalam bentuk nilai indeks.

Berdasarkan hasil resmi pengukuran e-Survey yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Jombang Tahun 2025 tercatat sebesar 6,83. Nilai ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 6,50, sehingga menunjukkan bahwa kondisi harmoni sosial, toleransi, dan kohesi sosial masyarakat Kabupaten Jombang berada pada kategori baik. Capaian ini mencerminkan terjaganya stabilitas sosial dan kehidupan demokrasi yang kondusif sebagai hasil dari sinergi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

2. Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)

Indeks Kewaspadaan Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kewaspadaan serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan merespons potensi kerawanan yang bersumber dari dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, informasi, dan keamanan. Pengukuran IKD dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sehingga pemerintah daerah tidak melakukan penghitungan secara mandiri, melainkan menggunakan hasil resmi pengukuran sebagai sumber data yang sah dan terverifikasi.

Penilaian IKD didasarkan pada hasil survei dan pengumpulan data kewaspadaan daerah yang dianalisis secara kuantitatif berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator yang telah ditetapkan. Nilai indeks mencerminkan efektivitas sistem kewaspadaan daerah, termasuk kemampuan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Proses ini juga menggambarkan tingkat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam



menjaga stabilitas sosial dan politik melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan hasil resmi pengukuran Indeks Kewaspadaan Daerah Tahun 2025, Kabupaten Jombang memperoleh nilai 75,26, melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 74. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan daerah Kabupaten Jombang berada pada kategori baik dan mencerminkan terjaganya stabilitas keamanan serta kondusivitas wilayah. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari penguatan fungsi deteksi dini, optimalisasi peran forum kewaspadaan daerah, serta sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika Ipoleksosbud, sehingga mendukung terwujudnya Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis.

Sasaran Meningkatkan harmoni sosial dan budaya

1. Nilai Sosial dan Budaya merupakan salah satu variabel penilaian dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Variabel ini mencerminkan kondisi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, seperti toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, serta kearifan lokal. Nilai sosial dan budaya diperoleh dari hasil pengolahan data survei e-Survey Riset Publik yang dilakukan secara daring, dan menjadi bagian dari agregasi keseluruhan Indeks Harmoni Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pengukuran IHaI Tahun 2025, nilai sosial dan budaya Kabupaten Jombang tercatat sebesar 6,83, yang diambil langsung dari nilai variabel sosial dan budaya dalam Indeks Harmoni Indonesia. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,48, menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya di Kabupaten Jombang berada pada kategori baik. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan kerukunan, penguatan nilai kebangsaan, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga keharmonisan sosial budaya,

sehingga turut mendukung tercapainya Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis.

Sasaran Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan

Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, partai politik, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Indikator ini menjadi bagian dari sasaran strategis Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja organisasi kemasyarakatan.

Target partisipasi pendidikan politik untuk tahun 2025 sebesar 60% ditetapkan berdasarkan perhitungan proyeksi target tahunan yang mengacu pada nilai awal tahun 2024 sebesar 35,191%, dengan peningkatan bertahap setiap tahun sesuai dengan formula pertumbuhan yang telah ditetapkan. Berdasarkan proyeksi, target pada tahun 2025 adalah 62,00%, yang menunjukkan kenaikan dari nilai dasar tahun 2024 dan menjadi tolok ukur peningkatan literasi politik masyarakat secara berkelanjutan.

Realisasi partisipasi masyarakat pada tahun 2025 mencapai 62,00%, sehingga capaian indikator ini mencapai 103,33% dari target yang ditetapkan ($62,00/60,00 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa program pendidikan politik yang dilaksanakan berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam pemahaman demokrasi, etika politik, dan partisipasi publik. Keberhasilan ini didukung oleh intensifikasi penyelenggaraan pendidikan politik, sosialisasi, serta kerja sama dengan partai politik dan lembaga pendidikan, sehingga partisipasi masyarakat melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Sasaran Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan

Hasil survei Indeks Kinerja Organisasi (IKO) Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jombang Tahun 2025, diperoleh nilai 66,29,

yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 66 (capaian 100,44%). Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi kemasyarakatan secara umum berada pada tingkat cukup baik, dan telah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Nilai IKO 66,29 merupakan agregasi dari lima dimensi penilaian, yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi/hubungan organisasi, keberlanjutan, dan ketahanan organisasi. Secara rinci, capaian dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Efektivitas Organisasi: 67,67
- Efisiensi Organisasi: 67,24
- Relevansi/Hubungan Organisasi: 65,95
- Keberlanjutan Organisasi: 62,93
- Ketahanan Organisasi: 67,67

Capaian tertinggi terdapat pada dimensi efektivitas dan ketahanan organisasi, yang menunjukkan bahwa Ormas telah mampu melaksanakan program sesuai misi dan tujuan serta memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal secara cukup baik. Sementara itu, capaian terendah terdapat pada dimensi keberlanjutan organisasi (62,93), yang mengindikasikan bahwa kesinambungan organisasi dalam jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat, terutama terkait sumber daya, kesinambungan program, dan regenerasi kepemimpinan.

Secara keseluruhan, pencapaian Indeks Kinerja Ormas yang melebihi target mencerminkan keberhasilan Bakesbangpol Kabupaten Jombang dalam melakukan pembinaan, pendataan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap Ormas. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik dalam negeri melalui peran Ormas dalam pendidikan politik, penguatan etika demokrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Meskipun target telah tercapai, peningkatan kinerja Ormas secara berkelanjutan perlu tetap menjadi fokus, khususnya pada aspek keberlanjutan organisasi, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini penting

untuk memastikan Ormas tidak hanya mampu berkontribusi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mempertahankan peran strategisnya dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud

Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud (Persen)

Berdasarkan data dari laporan khusus (monev perkembangan situasi), sepanjang tahun 2025 terdapat dinamika kejadian Ipoleksosbud yang tercatat dalam laporan khusus sebanyak 357. Dari jumlah laporan tersebut, kejadian Ipoleksosbud yang teridentifikasi mencapai 52 kejadian.

Upaya penanganan dan pengkondisian terhadap kejadian Ipoleksosbud menunjukkan capaian yang cukup tinggi, 304 kejadian berhasil ditangani secara efektif. Hal ini tercermin dari tingkat penyelesaian penanganan yang berada di atas 84%, dengan angka 85,15%.

Dengan tingkat penyelesaian penanganan yang konsisten dan stabil, target penurunan kejadian Ipoleksosbud sebesar 0,15% berhasil tercapai dengan realisasi 0,15%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem kewaspadaan dini, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme penanganan konflik sosial di Kabupaten Jombang berjalan efektif dan mampu merespons potensi gangguan secara cepat dan tepat.

Sasaran Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB) merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk aspek penyelenggaraan layanan publik, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi birokrasi. Pada tahun 2025, Bakesbangpol Kabupaten Jombang menargetkan nilai IRB sebesar 79,14.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian IRB Bakesbangpol Kabupaten Jombang pada tahun 2025 adalah 78,10, sehingga capaian kinerja mencapai 98,69% dari target yang ditetapkan. Meskipun nilai

realisasi masih berada sedikit di bawah target, capaian ini tetap menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Bakesbangpol berjalan cukup baik dan konsisten.

Nilai IRB yang mendekati target tersebut menggambarkan adanya peningkatan pada sejumlah aspek reformasi birokrasi, seperti penguatan sistem manajemen kinerja, perbaikan proses pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan integritas aparatur. Namun demikian, terdapat beberapa indikator penunjang yang belum sepenuhnya optimal, sehingga nilai IRB belum mencapai target.

Secara keseluruhan, capaian IRB sebesar 78,10 menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel. Keberhasilan ini menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola internal organisasi.

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Subbab ini menyajikan analisis perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun anggaran. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi antara perencanaan dan implementasi.

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara terukur. Analisis tidak hanya berfokus pada persentase capaian, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara target yang dirumuskan dengan kapasitas organisasi serta faktor-faktor yang memengaruhi realisasi kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi merupakan instrumen utama dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena melalui pendekatan ini dapat diidentifikasi tingkat ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kualitas pengendalian internal. Capaian yang melebihi target menunjukkan efektivitas intervensi program, sedangkan capaian yang belum memenuhi target menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Penyajian analisis dalam subbab ini dilakukan secara sistematis dengan membandingkan masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

MATRIK PKO

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK
Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,5	6,83	105,08%	10%	94,57%
	Indeks Kewaspadaan Daerah	Indeks	74	75,26	101,70%	10%	91,53%
Meningkatnya harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya	Nilai	6,48	6,83	105,40%	10%	94,86%
Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja organisasi kemasyarakatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	Persen	60	62	103,33%	10%	93%
	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	65	66,29	101,98%	10%	91,79%
Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dalam menghadapi kejadian lpoleksosbud	Persentase penurunan kejadian lpoleksosbud	Persen	0,15	0,15	100%	10%	90%
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79,14	78,10	98,69%	10%	88,82%
TOTAL CAPAIAN							644.569.999
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) ATAU RATA- RATA CAPAIAN							92,08
PREDIKAT PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI (PKO)							BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 92,08 persen dengan predikat Baik menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan konsistensi antara perencanaan dan realisasi kinerja.

Analisis lebih lanjut terhadap capaian tersebut perlu dilakukan secara rinci pada masing-masing sasaran strategis untuk menilai kesesuaian antara formulasi indikator, data dukung realisasi, serta kualitas upaya yang telah dilakukan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa capaian yang diperoleh tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan hasil nyata dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.



Uraian berikut menyajikan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dengan memuat perhitungan indikator sesuai Manual Indikator Kinerja Utama, data dukung realisasi, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi hasil kinerja Tahun 2025.

A. Tujuan

- Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis

Indikator 1 :

Indeks Harmoni Indonesia

Formulasi :

Setiap dimensi dihitung dari rata-rata indikatornya:

Dimensi = \sum Indikator/ Jumlah Indikator

Target : 6,5

Realisasi : 6.83

Data Dukung :

- Laporan hasil perhitungan Indeks Harmoni Indonesia
- Bukti survei Indeks Harmoni Indonesia di kabupaten jombang

Upaya :

- Peningkatan kerukunan antar umat beragama
- Peningkatan kerukunan antar suku dan etnis
- Peningkatan keharmonisan antar masyarakat

Faktor pendukung :

Terbentuknya mitra dan stakeholder dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dalam pelaksanaan keharmonisan antar manusia di daerah.

Faktor penghambat :

Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, dalam hal fasilitasi aula yang belum maksimal dan juga alat bantu komunikasi yang belum memadai.

Hambatan tersebut tidak berdampak pada keterpenuhan layanan secara keseluruhan.

Indikator 2 :

Indeks Kewaspadaan Daerah

Formulasi :

Setiap dimensi dihitung dari rata-rata indikatornya:

Dimensi = \sum Indikator/ Jumlah Indikator



Target : 74

Realisasi : 75,26

Data Dukung :

- Laporan hasil perhitungan Indeks Kewaspadaan Daerah
- Bukti survei Indeks Kewaspadaan Daerah di kabupaten jombang

Upaya :

- Peningkatan tingkat kerjasama terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah
- Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Pembinaan kepada masyarakat terkait kewaspadaan dini daerah saat terindikasi ada potensi konflik di daerah

Faktor pendukung :

Terbentuknya mitra dan stakeholder dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dalam pelaksanaan peningkatan kewaspadaan dini di daerah.

Faktor penghambat :

Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, dalam hal fasilitasi aula yang belum maksimal dan juga alat bantu komunikasi yang belum memadai.

Hambatan tersebut tidak berdampak pada keterpenuhan layanan secara keseluruhan.

B. Sasaran

- Meningkatkan harmoni sosial dan budaya

Indikator :

Nilai Sosial Dan Budaya

Formulasi :

Hasil rata-rata dari Nilai Dimensi Sosial dan Nilai Dimensi Budaya

Target : 6,48

Realisasi : 6,83

Data Dukung :

- Laporan hasil perhitungan Indeks Harmoni Indonesia
- Bukti survei Indeks Harmoni Indonesia di kabupaten jombang

Upaya :

- Peningkatan kerukunan antar umat beragama



- Peningkatan kerukunan antar suku dan etnis
- Peningkatan keharmonisan antar masyarakat

Faktor pendukung :

Terbentuknya mitra dan stakeholder dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dalam pelaksanaan keharmonisan antar manusia di daerah.

Faktor penghambat :

Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, dalam hal fasilitasi aula yang belum maksimal dan juga alat bantu komunikasi yang belum memadai.

Hambatan tersebut tidak berdampak pada keterpenuhan layanan secara keseluruhan.

- Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja organisasi kemasyarakatan

Indikator :

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

Formulasi :

Persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti pendidikan politik di daerah

Target : 60%

Realisasi : 62%

Data Dukung :

- Laporan kegiatan pendidikan politik tahun 2025
- Jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan

Upaya :

- Peningkatan pendidikan terkait politik kepada masyarakat
- Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan terkait pendidikan politik

Faktor pendukung :

Keberhasilan pendidikan politik dipengaruhi oleh akses informasi yang luas, intensitas sosialisasi, dukungan pemerintah daerah, peran aktif organisasi masyarakat, tingkat pendidikan warga, kepercayaan terhadap sistem politik, momentum pemilu atau pilkada, serta metode penyampaian yang inovatif dan partisipatif.

Faktor penghambat :

Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, dalam hal fasilitasi aula yang belum maksimal dan juga alat bantu komunikasi yang belum memadai.



Hambatan tersebut tidak berdampak pada keterpenuhan layanan secara keseluruhan.

Indikator :

Indeks Kinerja Ormas

Formulasi :

Nilai Organisasi masyarakat yang aktif dan berperan mensukseskan visi dan misi di pemerintahan daerah

Target : 65

Realisasi : 66,29

Data Dukung :

- Laporan hasil perhitungan Indeks Kinerja Ormas

Upaya :

- Peningkatan kinerja ormas yang aktif dalam daerah
- Pembinaan Ormas terkait pendidikan politik dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku

Faktor pendukung :

Indeks Kinerja Ormas didukung oleh tata kelola organisasi yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, keaktifan program kerja, transparansi dan akuntabilitas, serta kemitraan yang sinergis dengan pemerintah dan masyarakat.

Faktor penghambat :

Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, dalam hal fasilitasi aula yang belum maksimal dan juga alat bantu komunikasi yang belum memadai.

Hambatan tersebut tidak berdampak pada keterpenuhan layanan secara keseluruhan.

- Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dalam menghadapi kejadian lpotoksosbud

Indikator :

Persentase penurunan kejadian lpoleksosbud

Formulasi :

Jumlah kasus tahun n di bandingkan dengan kasus tahun n-1

Target : 0,15%

Realisasi : 0,15%

Data Dukung :

- Laporan khusus situasi dan kondisi di daerah tahun 2025
- Upaya :
- Pemetaan daerah rawan konflik di daerah
 - Peningkatan kegiatan pemantauan di daerah rawan konflik
 - Pembinaan mitra dan stakeholder tentang kewaspadaan dini.

Faktor pendukung :

Persentase penurunan kejadian IPOLEKSOSBUD dipengaruhi oleh efektivitas deteksi dini dan sistem kewaspadaan daerah, intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan pembinaan masyarakat dan ormas, peningkatan literasi kebangsaan, serta respons cepat dalam penanganan potensi konflik sosial.

Faktor penghambat :

Lemahnya deteksi dini, kurangnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya anggaran dan SDM, serta penyebaran informasi provokatif atau disinformasi yang memicu potensi konflik sosial..

Hambatan tersebut tidak berdampak pada keterpenuhan layanan secara keseluruhan

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja digunakan untuk mengukur kemajuan atas setiap kinerja organisasi perangkat daerah antara tahun kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realiasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	N/A	N/A	6.83
	Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	N/A	N/A	75.26

Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	N/A	N/A	6.83
Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	N/A	N/A	62.00
	Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	N/A	N/A	66.29
Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	N/A	N/A	0.15
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	78.10

Analisis Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya Tahun 2023 dan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja seiring dengan berlakunya dokumen perencanaan baru, yaitu RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Indikator-indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2025 merupakan indikator baru yang belum digunakan pada periode sebelumnya, sehingga data historis belum tersedia (N/A). Pada tingkat tujuan, indikator Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kewaspadaan Daerah baru mulai



digunakan pada Tahun 2025 sebagai alat ukur dalam mewujudkan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis. Oleh karena itu, realisasi Tahun 2025 sebesar 6,83 untuk Indeks Harmoni Indonesia dan 75,26 untuk Indeks Kewaspadaan Daerah menjadi baseline awal yang akan digunakan sebagai pembandingan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tingkat sasaran strategis, indikator nilai sosial dan budaya, persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan, serta persentase penurunan kejadian Ipoleksosbud juga merupakan indikator yang baru diterapkan pada Tahun 2025. Dengan demikian, realisasi Tahun 2025 masing-masing sebesar 6,83, 62%, 66,29, dan 0,15% menjadi titik awal pengukuran kinerja yang berkelanjutan pada periode perencanaan selanjutnya. Demikian pula pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 digunakan sebagai dasar pengukuran awal dalam kerangka RPJMD 2025–2029, dengan realisasi sebesar 78,10. Secara keseluruhan, meskipun belum tersedia data pembandingan dari Tahun 2023 dan 2024, realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dijadikan baseline kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang. Baseline ini sangat penting sebagai acuan evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jombang dapat dilihat dari pencapaian tujuan, sasaran, dan program yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Jombang. Tujuan Bakesbangpol mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, kerukunan, partisipasi politik, serta penguatan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, capaian kinerja Bakesbangpol hingga tahun 2025 menjadi indikator penting dalam menilai

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menciptakan Kabupaten Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis.

Tabel 3.4

Perbandingan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tujuann/Sasaran	Indikator	Target akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	70	6.83	6.83
	Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	79	75.26	75.26
Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	6.88	6.83	6.83
Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	85	62.00	62.00
	Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	71	66.29	66.29
Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	09	0.15	0.15
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79.19	78.10	78.10

Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD, secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tingkat tujuan, indikator Indeks Harmoni Indonesia terealisasi sebesar 6,83 dari target akhir RPJMD 7,00, dengan tingkat kemajuan 97,57%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi harmoni sosial dan kehidupan demokrasi di Kabupaten Jombang telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan. Sementara itu, Indeks Kewaspadaan Daerah mencapai nilai 75,26 dari target 79,00, dengan tingkat kemajuan 95,27%, yang mencerminkan bahwa sistem kewaspadaan dini daerah telah berjalan dengan baik namun masih perlu penguatan untuk mencapai target akhir RPJMD.

Pada tingkat sasaran strategis, sasaran meningkatnya harmoni sosial dan budaya menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Nilai sosial dan budaya terealisasi sebesar 6,83 dari target 6,88, dengan tingkat kemajuan 99,27%, yang mengindikasikan bahwa sasaran ini hampir sepenuhnya tercapai pada Tahun 2025.

Sasaran meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja organisasi kemasyarakatan menunjukkan hasil yang bervariasi. Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik baru mencapai 62% dari target akhir RPJMD 85%, dengan tingkat kemajuan 72,94%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik. Sementara itu, Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan mencapai 66,29 dari target 71,00, dengan tingkat kemajuan 93,37%, yang menunjukkan kinerja Ormas relatif baik dan mendekati target jangka menengah.

Pada sasaran meningkatnya kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud, indikator persentase penurunan kejadian Ipoleksosbud merupakan indikator yang bermakna

negatif, di mana capaian kinerja dinilai semakin baik apabila angka kejadian semakin menurun. Realisasi penurunan kejadian Ipoleksosbud pada periode pelaporan tercatat sebesar 0,15% dari target akhir RPJMD sebesar 0,09%, dengan tingkat kemajuan sebesar 33,3%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tren kejadian Ipoleksosbud berada pada arah yang menurun dan berada dalam koridor pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, serta pengendalian kejadian Ipoleksosbud yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait telah berjalan sangat efektif, sehingga mampu menekan potensi gangguan terhadap stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di daerah..

Selanjutnya, pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terealisasi sebesar 78,10 dari target akhir 79,19, dengan tingkat kemajuan 98,62%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik dan hanya memerlukan penyempurnaan pada aspek-aspek tertentu untuk mencapai target akhir RPJMD.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap target pembangunan jangka menengah. Hasil ini menjadi dasar yang kuat bagi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan penyusunan strategi percepatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna memastikan seluruh target RPJMD dapat tercapai secara optimal.

3.1.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 hanya sebagian yang dapat di perbandingkan secara langsung dengan capaian kinerja pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat karena memiliki struktur tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang berbeda. Setiap level pemerintahan memiliki mandat, ruang lingkup kewenangan, serta

indikator yang dirancang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dibandingkan dengan standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	realisasi nasional 2025
Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6.83	N/A	6,50
	Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	75.26	N/A	75
Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	6.83	N/A	6,50
Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	62.00	N/A	N/A
	Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	66.29	N/A	N/A
Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Kejadian Ipoleksosbud	0.15	N/A	N/A
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.10	N/A	N/A

Realisasi kinerja Bakesbangpol Kabupaten Jombang tahun 2025 menunjukkan capaian yang umumnya selaras dengan standar nasional, meskipun untuk beberapa indikator belum tersedia data pembandingan dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada indikator Indeks Harmoni Indonesia, realisasi Kabupaten Jombang sebesar 6,83, lebih tinggi dibandingkan standar nasional 6,50, yang mengindikasikan bahwa

tingkat harmonisasi sosial dan keberagaman di Kabupaten Jombang berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Begitu pula pada Indeks Kewaspadaan Daerah, realisasi 75,26 sedikit di atas standar nasional 75, menunjukkan bahwa kewaspadaan daerah dalam mendeteksi dan merespons potensi gangguan sosial-politik di Kabupaten Jombang telah berada pada level yang memenuhi standar nasional.

Indikator Nilai Sosial dan Budaya juga menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan standar nasional, dengan realisasi 6,83 dibandingkan 6,50, yang menandakan bahwa nilai sosial dan budaya masyarakat Jombang relatif kuat dan mendukung terwujudnya harmoni sosial dan budaya. Sementara itu, beberapa indikator lain seperti Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, Indeks Kinerja Ormas, Persentase penurunan kejadian *Ipoleksosbud*, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum memiliki data perbandingan standar Provinsi maupun Nasional, sehingga analisis perbandingan belum dapat dilakukan secara lengkap. Namun, capaian indikator tersebut tetap menunjukkan kinerja yang baik sesuai target internal daerah, khususnya pada Indeks Kinerja Ormas yang melebihi target dan Indeks Reformasi Birokrasi yang mendekati target.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Jombang pada indikator yang memiliki standar nasional menunjukkan posisi yang menguntungkan, karena berada di atas rata-rata nasional. Untuk indikator yang belum tersedia data perbandingan, perlu dilakukan pemutakhiran data standar provinsi dan nasional agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terukur. Hal ini penting agar perencanaan dan pembinaan ke depan dapat lebih tepat sasaran serta selaras dengan kebijakan daerah, provinsi, dan nasional.

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Bakesbangpol adalah kemampuan dalam memanfaatkan anggaran, SDM, sarana-prasarana, dan waktu secara tepat dan hemat untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan ketahanan nasional, kewaspadaan daerah, partisipasi



politik, serta tata kelola organisasi kemasyarakatan, sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

a. Aspek Manajemen

Tupoksi OPD sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

b. Aspek Sumber daya manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun nonformal. Peningkatan kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan, efektivitas koordinasi, serta ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 tercatat sebesar 85,59, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 73,28. Peningkatan nilai IP ASN ini menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Namun demikian, hingga 31 Desember 2025 jumlah aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penguatan dukungan sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Tabel 3.7
Sumber Daya Manusia berdasarkan kategori ASN

No	Kategori ASN			Total Jumlah
	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	
1	17	2	4	23

Tabel 3.8
Sumber Daya Manusia berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja				Total Jumlah
	Sekretariat	Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya]ya , Agama	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Bidang Kewaspadaan dan penanganan Konflik	
1	13	4	2	3	22

Tabel 3.9
Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja							Total Jumlah
	IX	V	IV	III	II	I	PPPK Paruh Waktu	
1	1	1	3	11	2	-	4	22

Tabel 3.10
Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

No	Pasca Sarjana	Sarjana S1/D-IV	D3	SMU (sederajat)	SMP (sederajat)	Total Jumlah
1	4	11	1	6		22

Tabel 3.11

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori ASN		Total Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	14	8	22

Tabel 3.12
Kebutuhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jombang

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Kepala Badan	14	1	1	0
2	Sekretaris	12	1	1	0
3	Sub Bagian Umpeg	9	1	1	0
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
5	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	1	1
6	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
7	Operator Layanan Operasional	-	3	1	2
8	penata Layanan Operasional	-	1	1	0
9	Perencana (Ahli Muda)	9	1	1	0
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Ahli Muda)	9	1	1	0
11	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
12	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
13	penata Layanan Operasional	-	0	1	-1
14	Pengolah Data dan Informasi	5	0	1	-1
15	Arsiparis (Terampil)	6	0	1	-1
16	Arsiparis (Ahli Pertama)	8	1	1	0
17	Perencana (Ahli Muda)	9	0	1	-1
18	Analisis Kebijakan (Ahli Madya)	12	0	1	-1
19	Perencana (Ahli Madya)	10	0	1	-1
20	Arsiparis (Penyelia)	7	0	1	-1
21	Arsiparis (Mahir)	7	0	1	-1
22	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	11	1	1	0

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
23	Analisis Kebijakan (Ahli Muda)	9	1	1	0
24	Analisis Kebijakan (Ahli Muda)	9	0	1	-1
25	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
26	penata Layanan Operasional	-	0	1	-1
27	Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
28	Pengadministrasi Perkantoran(Pemenpan KEMPENPAN 11 TAHUN 2024)	5	2	1	1
29	Analisis Kebijakan (Ahli Pertama)	9	0	1	-1
30	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	11	1	1	0
31	Analisis Kebijakan (Ahli Muda)	9	0	1	-1
32	Analisis Kebijakan (Ahli Muda)	9	0	1	-1
33	Penelaah Teknis Kebijakan	9	1	1	0
34	penata Layanan Operasional	-	0	1	-1
35	Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
36	Pengadministrasi Perkantoran(Pemenpan KEMPENPAN 11 TAHUN 2024)	5	0	1	-1
37	Analisis Kebijakan (Ahli Pertama)	9	0	1	-1
38	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11	1	1	0
39	Analisis Kebijakan (Ahli Muda)	9	1	1	0
40	Analisis Kebijakan (Ahli Muda)	9	0	1	-1
41	Penelaah Teknis Kebijakan	9	0	1	-1
42	penata Layanan Operasional	-	0	1	-1

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
43	Pengolah Data dan Informasi(Pemenpan KEPMENPAN 11 TAHUN 2024)	6	0	1	-1
44	Pengadministrasi Perkantoran(Pemenpan KEPMENPAN 11 TAHUN 2024)	5	0	1	-1
45	Analisis Kebijakan (Ahli Pertama)	9	0	1	-1
			21	45	-24

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang membutuhkan sebanyak 45 pegawai, sementara jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru 21 pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan 24 pegawai. Kekurangan tersebut terutama terjadi pada jabatan fungsional dan pelaksana teknis strategis, seperti Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan, Perencana, Arsiparis, serta Pengolah Data dan Informasi, yang berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan, kewaspadaan dini, pengelolaan data, dan pelaporan kinerja. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja pegawai yang ada dan memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga ke depan diperlukan penguatan sumber daya aparatur secara bertahap agar kinerja Bakesbangpol dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun Komposisi sumber daya manusia tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3.14

Tingkat Efisiensi Sumber daya Manusia

No	Sasaran	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	Ketercukupan pegawai	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Jombang yang	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	105,08	46,67	53,33

No	Sasaran	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	Ketercukupan pegawai	Tingkat Efisiensi
	aman, kondusif dan demokratis	Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	101,70	25,00	75,00
2	Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	105,40	50,00	50,00
3	Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	103,33	25,00	75,00
		Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	100,44	25,00	75,00
4	Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapai kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud (Persen)	100,00	25,00	75,00
5	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformai Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	96,69	61,90	38,10

Tingginya capaian kinerja di tengah keterbatasan sumber daya aparatur berdampak pada tingkat efisiensi yang cukup tinggi, yang tercermin dari nilai efisiensi pada sebagian besar indikator berada pada kisaran 50,00% hingga 75,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Jombang mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan mencegah risiko penurunan kualitas layanan, diperlukan penguatan ketercukupan pegawai secara bertahap agar efisiensi yang dicapai tidak bergantung pada beban kerja aparatur yang berlebihan.

C. Aspek sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang masih relatif terbatas, sehingga ke depan

diperlukan peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Pemenuhan kelengkapan fasilitas kerja tersebut menjadi penting agar pelaksanaan pelayanan, koordinasi, serta penyelenggaraan program di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan lancar.

Tabel 3.15
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	JENIS BARANG	LUAS (m2)	TH.PENG ADAAN	LETAK/ALAMAT	STATUS TANAH	PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA/NILAI	KET
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.III	493	2012	Jl. Urip Sumoharjo 47	Hak Pakai	Bakesbang	Pembelian	492.600	
2	Tanah Bangunan Kantor Permanen		1997	Jl.Gatot Subroto		Gedung Juang	Pembelian	2.231.250	
Jumlah								2.723.850	

Tabel: 3.17
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/TYPER	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	HARGA	KET.
A	ALAT-ALAT ANGKUT						
1	MOBIL	1	INNOVA	2010	BAIK	217.700.000	
2	MOBIL	1	SUZUKI AVP	2013	BAIK	158.785.000	
3	PICK UP	1	TOYOTA	1996	BAIK	23.000.000	
4	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	2001	BAIK	9.250.000	
5	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	1994	BAIK	750.000	
6	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	1997	BAIK	825.000	
7	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	1997	BAIK	825.000	
8	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	2005	BAIK	9.250.000	
9	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	2005	BAIK	925.000	
10	SEPEDA MOTOR	1	SUPRA X/NF 125 TD2008	2008	BAIK	12.171.000	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	HARGA	KET.
11	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/SUPRA X 125 TD	2013	BAIK	14.207.500	
12	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/SUPRA X 125 TD	2013	BAIK	14.207.500	
13	SEPEDA MOTOR	1	HONDA AFX12021C08M/T	2015	BAIK	16.266.000	
14	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/NEW SUPRA SPOKE F1	2016	BAIK	15.618.000	
15	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/NEW SUPRA SPOKE F1	2016	BAIK	15.618.000	
	JUMLAH	15				509.398.000	

Tabel 3.18 KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

NO	KONDISI	LETAK LOKASI /ALAMAT	LUAS (m2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.	
1	BANGUNAN GEDUNG TERTUTUP PERMANEN	JL.URIP SUMAHARJO	30	HAK PAKAI	APBD	21.555.150		
2	BANGUNAN GEDUNG PERMANEN	JL.GATOT SUBROTO	670,7	HAK PAKAI	APBD	418.516.800		
3	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN-LAIN	JL.URIP SUMOHARJO	200	HAK PAKAI	APBD	50.000.000		
4	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN-LAIN	JL.URIP SUMOHARJO	60	HAK PAKAI	APBD	32.997.700		
5	RUMAH NEGARA GOL.III TIPE B PERMANEN	JL.URIP SUMOHARJO	290	HAK PAKAI	APBD	870.497.800		
	JUMLAH						1.393.567.450	

Tabel 3.19 KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

NO	KONDISI	LETAK LOKASI /ALAMAT	LUAS (m2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.
1	BANGUNAN GEDUNG TERTUTUP PERMANEN	JL.URIP SUMAHARJO	30	HAK PAKAI	APBD	21.555.150	
2	BANGUNAN GEDUNG PERMANEN	JL.GATOT SUBROTO	670,7	HAK PAKAI	APBD	418.516.800	
3	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN-LAIN	JL.URIP SUMOHARJO	200	HAK PAKAI	APBD	50.000.000	

NO	KONDISI	LETAK LOKASI /ALAMAT	LUAS (m2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.
4	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN-LAIN	JL.URIP SUMOHARJO	60	HAK PAKAI	APBD	32.997.700	
5	RUMAH NEGARA GOL.III TIPE B PERMANEN	JL.URIP SUMOHARJO	290	HAK PAKAI	APBD	870.497.800	
JUMLAH						1.393.567.450	

Tabel 3.20 KIB D (INSTALASI)

NO	NAMA BARANG	LETAK LOKASI /ALAMAT	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.
1	INSTALASI GARDIU LISTRIK DISTRIBUSI KECEPATAN SEDANG	JL.URIP SUMAHARJO	HAK PAKAI	APBD	48.003.100	
JUMLAH					48.003.100	

Tabel: 3.21 Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
	02	PERALATAN DAN MESIN			
3		02.06.01.01.03	MESIN TIK MAN LONG		1
4		02.06.0104.01	ALMARI BESI		9
5		02.06.01.04.02	RAK BESI		5
6		02.06.01.04.04	FILLING BESI		8
7		02.06.01.05.01	PAPAN VISUAL		1
8		02.06.01.05.05	ALAT PENGHANCUR KERTAS		1
9		02.06.01.05.07	PAPAN PENGUMUMAN		2
10		02.06.01.05.10	WHITE BOARD		3
11		02.06.02.01.01	LEMARI KAYU		4
12		02.06.02.01.02	RAK KAYU		8
13		02.06.02.01.11	MEJA TULIS		5
14		02.06.02.01.13	MEJA TELEPHONE		1
15		02.06.02.01.19	MEJA PANJANG		14
16		02.06.02.01.28	KURSI TAMU		2

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
17		02.06.02.01.29	KURSI TANGAN		6
18		02.06.02.01.30	KURSI PUTAR		4
19		02.06.02.01.31	KURSI BIASA		16
20		02.06.02.01.34	KURSI LIPAT		5
21		02.06.02.03.01	M. PENGHISAP DEBU		1
22		02.06.02.04.03	AC WINDOW		5
23		02.06.02.04.04	AC SPLIT		7
24		02.06.02.06.08	SOUND SYSTEM		1
25		02.06.02.06.12	WARELESS		3
26		02.06.03.02.01	PC UNIT		8
27		02.06.03.02.03	NOTEBOOK		3
29		02.06.03.05.03	PRINTER		18
30		02.06.04.01.04	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON II		1
32		02.06.04.01.05	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON III		4
33		02.06.04.01.06	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON IV		4
34		02.06.04.01.09	MEJA KERJA PEJABAT		5
35		02.06.04.03.04	KURSI KERJA PEJABAT ESSELON II		1
36		02.06.04.03.05	KURSI KERJA PEJABAT ESSELON III		4
37		02.06.04.03.09	KURSI KERJA PEJABAT		12
38		02.07.01.01.01	KAMERA+ATTACHMENT		1
39		02.07.01.01.03	PROYEKTOR+ATTACHMENT		1
40		04.03.06.02.02	INSTALASI GERDU LISTRIK		1
42		02.07.02.01.20	FACSIMILE		2
43		02.07.02.02.05	RIX		1
44		02.06.02.64.07	EXHAUST FAN		6
45		02.06.03.02.02	LAPTOP		8

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
46		02.09.01.46.04	ALAT PEMADAM KEBAKARAN		3

Sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik dan dikelola secara optimal. Kebutuhan sarana prasarana yang mendukung kinerja dan pelayanan publik direncanakan serta diusulkan melalui mekanisme penganggaran sesuai kebutuhan organisasi.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

**RKBMD P- APBD 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGAD AAN PERIODE JAN-April 2025	P-RKBMD 2025					
						PENGHAPU SAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAA TAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAA N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
01.01.01.04.003	1	Tanah Rumah Neg. Gol. Iii	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.02.01.01.003	2	Station Wagon	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.02.01.01.002	3	Pick Up	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.02.01.04.001	4	Sepeda Motor	12	0	0	0	0	12	12	12	0
02.05.01.01.003	5	Mesin Tik Man Long (18..)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01/04.001	6	Almari Besi/Metal	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01/04.001	7	Rak Besi / Metal	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01/04.001	8	Filling Besi/Metal	4	0	0	0	0	4	4	4	0
02.05.01/04.001	9	Papan Visual	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01/04.001	10	Alat Penghancur Kertas	1	0	0	0	0	1	1	1	1
02.05.01.05.077	11	Papan Pengumuman	4	0	0	0	0	4	4	4	0

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGAD AAN PERIODE JAN-April 2025	P-RKBMD 2025					
						PENGHAPU SAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAA TAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAA N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
02.05.01.05.005	12	White Board	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01.05.005	13	Lemari Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01.04.004	14	Rak Kayu	3	0	0	0	0	3	3	3	0
02.05.02.01.024	15	Meja Tulis	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.02.01.012	16	Meja Telepon	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01.01.013	17	Meja Podium	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.01.01.017	18	Meja Panjang	7	0	0	0	0	7	7	7	0
02.05.02.01.031	19	Kursi Tamu	1	2	0	0	0	3	1	3	0
02.05.02.01.033	20	Kursi Tangan	14	0	0	0	0	14	14	14	0
02.05.02.01.033	21	Kursi Putar	5	0	0	0	0	5	5	5	0
02.05.02.01.033	22	Kursi Biasa	27	0	0	0	0	27	27	27	0
02.05.02.01.036	23	Kursi Lipat	2	0	0	0	0	2	2	2	0

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGAD AAN PERIODE JAN-April 2025	P-RKBMD 2025					
						PENGHAPU SAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAA TAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAA N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
02.05.02.03.001	24	M.Penghisap Debu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.02.04.003	25	Ac Unit	13	0	0	0	0	13	13	13	0
02.05.02.04.004	26	Ac. Split	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.02.04.007	27	Exhause ter fan	4	0	0	0	0	4	4	4	0
02.05.02.06.002	28	Televisi	3	0	0	0	0	3	3	3	0
02.05.02.06.008	29	Sound System	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.05.02.06.012	30	Ware Less	5	0	0	0	0	5	5	5	0
02.05.02.06.036	31	Tangga Almunium	10	0	0	0	0	10	10	10	0
02.10..01.02.001	32	P.C. Unit	8	0	0	0	0	8	8	8	0
02.10..01.02.002	33	Lap Top	8	2	0	0	0	8	8	8	0
02.10..01.02.003	34	Note Book	5	0	0	0	0	5	5	5	0
02.10..02.03.003	35	Printer	18	2	0	0	0	18	18	18	0
02.10..02.03.004	36	Scanner	3	0	0	0	0	3	3	3	0
02.05.03.01.007	37	Meja Kerja Pejabat Eselon li	1	0	0	0	0	1	1	1	0

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGAD AAN PERIODE JAN-April 2025	P-RKBMD 2025					
						PENGHAPU SAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAA TAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAA N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
02.05.03.01.008	38	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.05.03.01.008	39	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	5	0	0	0	0	5	5	5	0
02.05.03.01.008	40	Meja Kerja Pejabat	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.03.01.004	41	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.03.01.005	42	Kursi Kerja Pejabat	4	0	0	0	0	4	4	4	0
02.05.02.06.011	43	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.06.01.02.003	44	Camera+Attachment	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.02.06.011	45	Proyektor+Attachment	4	0	0	0	0	4	4	4	0
02.06.02.01.010	46	Facsimile	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.06.02.02.004	47	RIX	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.06.01.41.004	48	Alat Pemadam Kebakaran	3	0	0	0	0	3	3	3	0
03.01.01.02.001	49	Gudang Tertutup Permanen	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.06.01.41.004	50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2	0	0	0	0	2	2	2	0

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGAD AAN PERIODE JAN-April 2025	P-RKBMD 2025					
						PENGHAPU SAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAA TAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAA N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
01.01.01.04.001	51	Rtt.Gol.Iii Per.Klas Iii	1	0	0	0	0	1	1	1	0
04.03.06.02.002	52	Inst.Grd.Distr.Kap.Sedang	3	0	0	0	0	3	3	3	0
02.05.01.05.012	53	Finger Print	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.05.02.04.001	54	Lemari Es	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.02.06.007	56	Speaker kotak	6	0	0	0	0	6	6	6	0
02.05.02.06.014	57	Mega phone	3	0	0	0	0	3	3	3	0
02.05.01.05.002	58	CCTV	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.05.02.04.059	59	Gorden aula	5	0	0	0	0	5	5	5	0
02.05.02.01.018	60	Meja Bundar	5	0	0	0	0	5	5	5	0
02.05.02.06.017	61	Layar Digital Signage	2	0	0	0	0	2	2	2	0
02.05.01.05.003	62	Papan Informasi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
02.10.02.01.004	63	Tablet	1	1	0	0	0	1	1	1	0



3.2 Realisasi anggaran

Pengukuran realisasi anggaran adalah pengukuran berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD dan APBD tahun 2025.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian PK 2025	Anggaran 2025	Realisasi anggaran 2025	Capaian anggaran 2025
Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6.83	19.214.975.759	18.584.224.525	96.72
	Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	75.26	19.214.975.759	18.584.224.525	96.72
Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	6.83	988.620.300	971684.150	98.29
Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	62.00	6.222.688.900	6.136.742.000	98.62
	Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	66.29	7.007.887.500	6.901.884.800	98.49
Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	0.15	574.977.400	542.406.500	94.34
Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.10	4.420.801.659	4.031.507.075	91.19



Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Jombang mampu mengelola anggaran secara efisien, karena capaian kinerja pada sebagian besar indikator berhasil tercapai atau melebihi target meskipun realisasi anggaran berada di bawah pagu anggaran. Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2025 berada pada kisaran 91,19% hingga 98,62% dari anggaran yang ditetapkan, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik dan konsisten.

Pada sasaran Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis, capaian Indeks Harmoni Indonesia sebesar 6,83 dan Indeks Kewaspadaan Daerah sebesar 75,26 tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 96,72% dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang digunakan telah efektif dalam mendukung kegiatan pembinaan, pemantauan, dan penguatan kerukunan sosial serta kewaspadaan daerah.

Untuk sasaran Meningkatkan harmoni sosial dan budaya, capaian nilai sosial dan budaya sebesar 6,83 berhasil diraih dengan realisasi anggaran 98,29%. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung penguatan nilai sosial dan budaya masyarakat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan.

Pada sasaran Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan, capaian partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik sebesar 62,00% dan Indeks Kinerja Ormas sebesar 66,29 berhasil dicapai dengan realisasi anggaran masing-masing 98,62% dan 98,49%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik serta pembinaan organisasi kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan anggaran yang cukup tinggi dan terukur.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud, capaian penurunan kejadian sebesar 0,15% tercapai dengan realisasi anggaran 94,34%, yang menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan

kewaspadaan dan penanganan kejadian Ipoleksosbud meskipun penyerapan anggaran relatif lebih rendah dibandingkan sasaran lainnya.

Untuk sasaran Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 78,10 dicapai dengan realisasi anggaran 91,19%, yang merupakan tingkat penyerapan anggaran terendah di antara indikator lainnya. Meskipun demikian, capaian kinerja tetap mendekati target, menunjukkan bahwa program reformasi birokrasi berjalan cukup baik meskipun terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi anggaran dan perbaikan administrasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Jombang tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif dalam mendukung pencapaian target, dengan penyerapan anggaran yang tinggi dan kinerja yang memenuhi atau mendekati target. Namun, terdapat indikasi bahwa beberapa indikator masih membutuhkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, terutama pada indikator Reformasi Birokrasi dan Penurunan Kejadian Ipoleksosbud, agar kinerja dapat lebih optimal sejalan dengan peningkatan penyerapan anggaran.

c. Aspek penganggaran

Anggaran Bakesbangpol Tahun 2025 sebesar Rp19.214.975.759 terealisasi Rp18.584.224.525 atau 96,72%, sehingga efisiensi belanja sebesar 3,28%. Dengan realisasi anggaran yang tinggi, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja secara efisien. Data perbandingan realisasi anggaran dan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	105,08	96,72	3,28
		Indeks Kewaspadaan Daerah (Indeks)	101,70	96,92	3,28
2	Meningkatkan harmoni sosial dan budaya	Nilai sosial dan budaya (nilai)	105,40	98,49	1,51
3	Meningkatnya partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pendidikan politik (Persen)	103,33	98,62	1,38
		Indeks Kinerja Ormas (Indeks)	100,44	98,49	1,51
4	Meningkatnya Kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud (Persen)	100,00	94,34	5,66
5	Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indek Reformai Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	96,69	91,19	8,81

Rata-rata efisiensi penggunaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang pada tahun 2025 berada di atas 3%,

sementara rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan Bakesbangpol dalam mengelola dan memanfaatkan alokasi dana secara efektif, sehingga dengan penggunaan anggaran yang relatif terkendali, target dan indikator kinerja tetap dapat dicapai secara maksimal. Setiap pengeluaran anggaran telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian hasil, sehingga capaian kinerja yang tinggi dapat diraih tanpa pemborosan sumber daya. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi lintas sektor, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta penguatan peran forum strategis dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Kabupaten Jombang.

a. Indikator tujuan dan sasaran

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah tercapai dengan baik, sebagaimana terlihat pada Tabel capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penetapan target dilaksanakan secara tepat, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan strategis daerah. Pencapaian indikator seperti Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kewaspadaan Daerah, Indeks Kinerja Ormas, serta Indeks Reformasi Birokrasi menjadi bukti keberhasilan dalam menjaga stabilitas Ipoleksosbud, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

Bakesbangpol Kabupaten Jombang Tahun 2025 memiliki beberapa program utama yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut meliputi penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan pendidikan politik dan demokrasi, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial. Setiap program memiliki indikator yang selaras dengan tujuan utama, yaitu terciptanya Kabupaten Jombang

yang aman, kondusif, demokratis, serta terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.

sasaran Program	Program	Indikator
Terinternalisasinya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peringatan Hari Besar Nasional
Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Rogram peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pemilih Pemula Yang Mendapatkan Pendidikan Politik
Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Ormas/LSM Yang Aktif
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Penanganan Konflik IPOLEKSOSBUD Yang Di Selesaikan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Hambatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah SDM sehingga beban kerja tinggi dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas pendukung kegiatan lapangan dan teknologi informasi, sehingga efektivitas pelaksanaan program terbatas.
3. Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya maksimal, sehingga beberapa kegiatan pembinaan dan penanganan konflik belum terintegrasi secara efektif.
4. Partisipasi masyarakat dan ormas belum merata, sehingga dampak program pembinaan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik belum mencapai seluruh kelompok masyarakat.
5. Pengaruh hoaks dan intoleransi yang masih terjadi di masyarakat, sehingga memerlukan upaya literasi dan moderasi berkelanjutan.
6. Pemahaman reformasi birokrasi yang belum merata di kalangan ASN, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal di beberapa aspek.

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Capaian strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	10%	4,7
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,5
	Rencana Aksi	4%	1,33
	Monitoring dan evaluasi	4%	1,87
2	Capaian sasaran strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	73,40
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	41,96
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang professional	40%	31,44
	Total	100%	78,10

Berikut Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Hasil Penilaian Indikator Kegiatan Utama Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Sumber Data
A	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4,70	Bagian Organisasi
B	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
I	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang		
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	69	Bagian Organisasi
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	4.00	Bagian Organisasi
3	Indeks Penerapan SPBE	94.67	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,99	BAPPEDA
5	Nilai SAKIP	75.05	Bagian Organisasi
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	4.00	Bagian Organisasi
7	Tingkat Pembangunan ZI	3.50	Bagian Organisasi
8	Maturitas SPIP	0	Inspektorat
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.93	Bagian Organisasi
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	81.74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	100.00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	100,00	BPKAD

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Sumber Data
14	Indeks Pengelolaan Aset	88,75	BPKAD
II	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	100	Inspektorat
A	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional		
1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	90	BKPSDM
2	Indeks Profesionalitas ASN	85,59	BKPSDM
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	59,59	Bagian Organisasi
4	Indeks Pelayanan Publik	3,21	Bagian Organisasi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,51	Bagian Organisasi

Penurunan nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 menjadi 75,05 dibandingkan Tahun 2024 sebesar 79,23 menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Upaya perbaikan difokuskan pada pemenuhan indikator yang belum optimal, peningkatan pemahaman ASN terhadap reformasi birokrasi, serta penguatan manajemen kinerja dan kualitas pelayanan. Langkah perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali nilai Reformasi Birokrasi pada periode berikutnya sesuai target yang ditetapkan.

3.6 Rencana Tindaklanjuti

Berdasarkan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang perlu segera menindaklanjuti rekomendasi dengan memperbaiki rencana aksi, meningkatkan komitmen ASN, serta memperkuat pengawasan dan layanan publik secara berkelanjutan.

Table ...Rencana tindak Lanjut Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
1A	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4.70	melibatkan Agen Perubahan secara aktif dalam mengawal perubahan organisasi, disertai dokumentasi serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan sesuai Perbup Nomor 72 Tahun 2022. Rencana aksi Reformasi Birokrasi akan diperbaiki agar lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata. Selain itu, pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terhadap Reformasi Birokrasi akan diperkuat agar pelaksanaannya berdampak langsung pada peningkatan	<p>Mengaktifkan Agen Perubahan untuk mengawal perubahan organisasi, didokumentasikan, dan dimonev secara rutin.</p> <p>Menyusun ulang rencana aksi RB yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis masalah nyata dengan indikator hasil yang jelas.</p> <p>Meningkatkan pemahaman dan komitmen pegawai, khususnya Tim RB, agar reformasi birokrasi berdampak nyata pada kinerja dan pelayanan</p>	Tribulan I s.d III Tahun 2025	Ketua Tim Reformasi Birokrasi	Dalam Proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
			kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.				
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	4.00	Segera lakukan reviu dan evaluasi SOP serta proses bisnis Bakesbangpol oleh Tim Kerja, lalu hasilnya dituangkan dalam dokumen resmi Perangkat Daerah	Aktifkan Tim Reviu SOP untuk menilai SOP dan proses bisnis. Perbaiki SOP berdasarkan hasil evaluasi.	Tribulan I s.d III Tahun 2026		Dalam Proses tindaklanjut
5	nilai SAKIP	75.05	Menindaklanjuti rekomendasi tim evaluator yang tercantum pada huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.	Mempelajari rekomendasi huruf d dalam LHE AKIP 2025. Menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi tersebut. Melaksanakan perbaikan sesuai rencana aksi.	Tribulan I s.d III Tahun 2027		Dalam Proses tindaklanjut
6	Tingkat digitalisasi layanan	4.00	Tetapkan tata kelola One-Data (data steward & mutu data).	Tentukan data steward dan buat aturan mutu data One-Data.	Tribulan I s.d III Tahun 2028		Dalam Proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
			Bangun integrasi layanan dan nomor tiket seragam.	Rancang dan bangun pusat integrasi (API gateway/ESB) serta sistem nomor tiket terpadu.			
			Aktifkan pemantauan layanan dan sistem peringatan.	Implementasikan observability untuk memantau SLA/SLI dan sistem peringatan insiden.			
			Formalkan manajemen perubahan agar fitur baru tidak menurunkan kepuasan.	Buat prosedur manajemen perubahan agar penambahan fitur tidak menurunkan kepuasan layanan			

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
7	Tingkat pembangunan ZII	3.50	Melanjutkan pembangunan Zona Integritas dan memperkuat program secara berkelanjutan dengan fokus pada isu strategis serta permasalahan yang ada, sesuai PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021.	Melanjutkan pembangunan Zona Integritas sesuai tahapan PERMENPANRB No. 90/2021. Memperkuat dan memperbaiki program secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan masalah yang ada. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan perbaikan berjalan dan berdampak	Tribulan I s.d III Tahun 2029		Dalam Proses tindaklanjut
8	Maturitas SPIP	0	Meningkatkan pelaksanaan SPIP di OPD sesuai ketentuan dengan koordinasi rutin bersama Tim SPIP Kabupaten.	Melaksanakan peningkatan SPIP di OPD dan rutin berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten untuk penguatan pengendalian internal.	Tribulan I s.d III Tahun 2030		Dalam Prose tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,93	Memperkuat sistem anti-korupsi dan pengawasan dengan menerapkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi pencegahan korupsi.	Meningkatkan pengawasan dan penerapan integritas, transparansi, serta akuntabilitas melalui penguatan sistem anti-korupsi dan inovasi pencegahan.	Tribulan I s.d III Tahun 2031		Dalam Proses tindaklanjut
10	Indeks Pengawasan Kearsipan	81,74	Menindaklanjuti rekomendasi tim evaluator sebagaimana tercantum dalam Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	Menyusun dan melaksanakan rencana aksi atas rekomendasi Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025 serta melaporkan hasilnya	Tribulan I s.d III Tahun 2032		Dalam Proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
14	Indeks pengelolaan Aset	88.75	Memastikan keselarasan RKBMD dengan RKA dan aset yang dibeli, tertib pencatatan serta pemeliharaan BMD sesuai ketentuan, ketepatan waktu pelaporan pengadaan bulanan ke BPKAD, dan kesesuaian entri penatausahaan aset dengan data belanja modal.	Melakukan sinkronisasi RKBMD, RKA, dan realisasi aset; menertibkan pencatatan serta pemeliharaan BMD sesuai KIB; menyampaikan laporan pengadaan bulanan tepat waktu ke BPKAD; dan memastikan entri aset sesuai dengan belanja moda	Tribulan I s.d III Tahun 2033		Dalam Proses tindaklanjut
15	tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	90.00	Meningkatkan kualitas pelaksanaan SKP melalui dokumentasi kinerja yang lebih lengkap serta mendorong ASN mengikuti program ASN berprestasi untuk meningkatkan kinerja.	Melengkapi dokumentasi kinerja SKP secara konsisten dan mendorong partisipasi ASN dalam program ASN berprestasi.	Tribulan I s.d III Tahun 2034		Dalam Prose tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
A.1	Indeks Profesionalitas ASN	85.59	Meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kompetensi dan diklat ASN serta penguatan pembinaan disiplin guna meningkatkan predikat kinerja dan menekan sanksi disiplin.	Melaksanakan peningkatan kompetensi dan diklat ASN secara terencana serta memperkuat pembinaan disiplin untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan pelanggaran disiplin.	Tribulan I s.d III Tahun 2035		Dalam Prose tindaklanjut
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	59.59	Memperkuat komitmen pimpinan terhadap nilai BerAKHLAK dengan menerapkannya dalam aktivitas kerja sehari-hari melalui mekanisme kerja dan manajemen kinerja yang dievaluasi secara rutin serta diberikan umpan balik agar nilai tersebut benar-benar tercermin dalam perilaku, bukan hanya	menegaskan komitmen pimpinan melalui kebijakan internal, memasukkan nilai BerAKHLAK ke dalam penilaian kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin disertai feedback perilaku kerja. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan agar nilai BerAKHLAK benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan atau dokumen.	Tribulan I s.d III Tahun 2036		Dalam Proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
			sebagai slogan atau dokumen				

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Target	penanggungjawab	status/ Progres Tindaklanjut
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,51	segera melakukan Tindaklanjut dari RTL yg ditetapkan	indak lanjut yang dilakukan adalah segera melaksanakan langkah-langkah dalam RTL yang telah ditetapkan, memastikan seluruh kegiatan dan perbaikan dilaksanakan sesuai jadwal, serta melakukan pemantauan berkala untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitas pelaksanaan	Tribulan I s.d III Tahun 2037		Dalam Proses tindaklanjut

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dalam menyampaikan capaian kinerja, pemanfaatan anggaran, serta pelaksanaan program yang mendukung stabilitas dan ketahanan sosial-politik daerah. LKjIP ini menjadi dasar evaluasi kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas program pada tahun berikutnya.

Dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja, efisiensi anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi evaluasi, LKjIP Bakesbangpol Tahun 2025 dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan, penguatan sistem, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, dokumen ini menjadi rujukan strategis dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2025, secara keseluruhan tujuan dan sasaran strategis telah tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang melebihi target pada indikator utama seperti Indeks Harmoni Indonesia (105,08), Indeks Kewaspadaan Daerah (101,70), Nilai Sosial dan Budaya (105,40), serta Indeks Kinerja Ormas (100,44). Capaian kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas Ipoleksosbud, meningkatkan partisipasi politik, serta memperkuat harmoni sosial dan budaya di Kabupaten Jombang.

Realisasi anggaran Bakesbangpol Tahun 2025 sebesar 96,72% hingga 98,62% pada berbagai sasaran menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi berkisar 1,38% sampai 5,66%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif sehingga target kinerja dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif rendah. Meskipun demikian, terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan peningkatan efisiensi dan penguatan program, khususnya pada sasaran kewaspadaan daerah dan reformasi birokrasi.

Dari aspek sumber daya manusia, IP ASN Bakesbangpol Tahun 2025 meningkat menjadi 85,59 dibandingkan tahun 2024 sebesar 73,28, yang menunjukkan peningkatan profesionalitas dan kompetensi aparatur. Namun, ketersediaan ASN dan tenaga ahli masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan SDM untuk mendukung beban kerja yang semakin meningkat. Ketersediaan sarana dan prasarana secara umum dalam kondisi baik, namun perlu peningkatan pemeliharaan dan penambahan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bakesbangpol menunjukkan nilai total 78,10 dengan capaian sasaran strategis 73,40 dan capaian strategi 4,70. Beberapa indikator seperti Indeks Penerapan SPBE (94,67), Indeks Perencanaan Pembangunan (92,99), dan Indeks Pengelolaan Aset (88,75) menunjukkan capaian yang baik. Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki seperti pengelolaan agen perubahan, penyusunan rencana aksi yang lebih konkret, dan peningkatan internalisasi nilai BerAKHLAK pada ASN.

Sebagai tindak lanjut, Bakesbangpol akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan, menyempurnakan perencanaan dan penganggaran, serta melakukan perbaikan sistem pengelolaan aset, pelaporan, dan reformasi birokrasi. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi pada tahun berikutnya dan mewujudkan Kabupaten Jombang yang aman, kondusif, demokratis, serta birokrasi yang bersih dan akuntabel.

4.2 Upaya Perbaikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang akan melaksanakan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Upaya perbaikan ini disusun untuk memperkuat kerukunan, kewaspadaan, partisipasi politik, kinerja Ormas, penanganan konflik Ipoleksosbud, serta tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

- a. Sasaran 1: Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis
 - Memperkuat pembinaan kerukunan melalui dialog antaragama dan antar kelompok masyarakat secara rutin.
 - Menggiatkan edukasi nilai Pancasila, toleransi, dan kebhinekaan di sekolah, komunitas, dan media sosial.
 - Memperkuat koordinasi forum kewaspadaan, deteksi dini konflik, dan respons cepat lintas sektor.
- b. Sasaran 2: Meningkatkan harmoni sosial dan budaya
 - Mengintensifkan literasi sosial dan moderasi beragama untuk menekan hoaks dan intoleransi.
 - Menggiatkan kegiatan budaya lokal dan kerukunan masyarakat secara berkelanjutan.
- c. Sasaran 3: Meningkatkan partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Ormas
 - Memperluas akses pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula.
 - Mengintensifkan pembinaan Ormas melalui pendataan, pelatihan, dan evaluasi berkala.
 - Mendorong Ormas aktif dalam kegiatan sosial dan program pembangunan daerah.
- d. Sasaran 4: Meningkatkan kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud
 - Memperkuat sistem deteksi dini, pemetaan risiko, dan respons cepat.
 - Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan stakeholder terkait dalam pencegahan dan penanganan konflik.

- e. Sasaran 5: Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif
- Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang lebih konkret, terukur, dan berdampak.
 - Meningkatkan pemahaman ASN terhadap reformasi birokrasi dan budaya kerja BerAKHLAK.
 - Mengoptimalkan digitalisasi layanan, pengawasan internal, serta penguatan sistem anti korupsi.

4.3 Inovasi dan Penghargaan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya mewujudkan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang terus melakukan berbagai upaya penguatan kinerja melalui inovasi tata kelola serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut membuahkan hasil yang tercermin dari diraihnya berbagai penghargaan pada Tahun 2025. Salah satu capaian yang membanggakan adalah diterimanya Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian Peringkat 6 Prestasi Terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengelola dan menangani potensi konflik sosial secara terpadu melalui sinergi antar perangkat daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pendekatan preventif dan kolaboratif dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di Kabupaten Jombang.

gambar 4.1

Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian Prestasi Terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan pada Jumat, 19 Desember 2025



Selain itu, pada Senin, 17 November 2025, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, Budi Winarno, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang, Hartono, mewakili Bupati Jombang dalam menerima Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025. Penghargaan ini menunjukkan pengakuan atas capaian Kabupaten Jombang dalam membangun dan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan sistem pengukuran indikator komposit yang digunakan untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di tingkat kabupaten/kota. IHaI diampu oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dengan pelaksanaan teknis di daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indeks ini menjadi instrumen evaluasi penting dalam mengukur kerukunan dan keseimbangan sosial berdasarkan karakteristik, dinamika, serta tantangan masing-masing wilayah. Pencapaian penghargaan tersebut menunjukkan bahwa inovasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Ke depan, capaian ini akan dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat sistem deteksi dini, serta mengembangkan inovasi kebijakan guna mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Jombang yang harmonis, aman, dan berkelanjutan

Gambar 4.2

Menerima Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
Tahun 2025.



4.4 Upaya Perbaikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang akan melaksanakan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Upaya perbaikan ini disusun untuk memperkuat kerukunan, kewaspadaan, partisipasi politik, kinerja Ormas, penanganan konflik Ipoleksosbud, serta tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

- a.** Sasaran 1: Mewujudkan Jombang yang aman, kondusif dan demokratis
- Memperkuat pembinaan kerukunan melalui dialog antaragama dan antar kelompok masyarakat secara rutin.
 - Menggiatkan edukasi nilai Pancasila, toleransi, dan kebhinekaan di sekolah, komunitas, dan media sosial.
 - Memperkuat koordinasi forum kewaspadaan, deteksi dini konflik, dan respons cepat lintas sektor.
- b.** Sasaran 2: Meningkatkan harmoni sosial dan budaya
- Mengintensifkan literasi sosial dan moderasi beragama untuk menekan hoaks dan intoleransi.
 - Menggiatkan kegiatan budaya lokal dan kerukunan masyarakat secara berkelanjutan.
- c.** Sasaran 3: Meningkatkan partisipasi politik dalam negeri dan kinerja Ormas
- Memperluas akses pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula.
 - Mengintensifkan pembinaan Ormas melalui pendataan, pelatihan, dan evaluasi berkala.
 - Mendorong Ormas aktif dalam kegiatan sosial dan program
- d.** Sasaran 4: Meningkatkan kewaspadaan daerah dalam menghadapi kejadian Ipoleksosbud
- Memperkuat sistem deteksi dini, pemetaan risiko, dan respons cepat.

- Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan stakeholder terkait dalam pencegahan dan penanganan konflik.
- e. Sasaran 5: Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif
- Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang lebih konkret, terukur, dan berdampak.
 - Meningkatkan pemahaman ASN terhadap reformasi birokrasi dan budaya kerja BerAKHLAK.
 - Mengoptimalkan digitalisasi layanan, pengawasan internal, serta penguatan sistem anti korupsi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini mencerminkan upaya nyata dalam menjaga stabilitas, meningkatkan partisipasi politik, memperkuat kerukunan sosial, serta memperbaiki tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Seluruh capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga pada tahun-tahun berikutnya kinerja Bakesbangpol dapat lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Kami mengharapkan saran, masukan, dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Jombang yang aman,

kondusif, demokratis, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan.

Jombang, Januari 2026

KEPALA BAKESBANGPOL



BUDI WINARNO, ST,M.Si
NIP. 19741001999011001

LAMPIRAN

JENIS DOKUMEN	LINK AKSES
Perjanjian Kinerja	https://drive.google.com/file/d/19BxItvzJ2beMC0h8w8apSmVX68kTmR2V/view?usp=sharing
Penetapan IKU	https://drive.google.com/file/d/1GCWnWDefBxXkOT58MjINLOglEvMouvXV/view?usp=sharing
KKPT	https://drive.google.com/drive/folders/1hR26LyVg80OdoAOYiJVYGPiDhDnozbyZY?usp=sharing
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	https://drive.google.com/drive/folders/1WWa1s2SpxInlTS9ziwqOvfJLmO9TYHq6?usp=sharing
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	https://drive.google.com/drive/folders/1xKbLtkYoJKZQUCb76VtrT9kltvK5Nk2J?usp=sharing
Pengukuran Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1uiyNTW7S_h1vI5ZUY3Wac5G-k2u_8vbp?usp=sharing
Peta Proses Bisnis	https://drive.google.com/drive/folders/1grCm775JG3RlHY2VGKRI6N9u48Bo0ZSx?usp=sharing
Cascading	https://drive.google.com/file/d/19BxItvzJ2beMC0h8w8apSmVX68kTmR2V/view?usp=sharing